



Integrasi Etika dan Regulasi dalam Penanganan Misinformasi di Media Digital pada Era Post-Truth

Integrating Ethics and Regulation in Combating Misinformation in Digital Media in the Post-Truth Era

Wirda Delima*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Hasan Szali, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

ABSTRACT

The post-truth era is marked by the prevalence of inaccurate information and the rapid spread of disinformation through digital media. This research explores the relationship between communication ethics and policy regulations as tools to address these challenges, focusing on regulations implemented to tackle disinformation. One example of the regulations analyzed is the General Data Protection Regulation (GDPR) in the European Union and Digital Media Regulations in Indonesia, which aim to limit the spread of false information while maintaining freedom of speech. The study also assesses the impact on individual privacy and freedom of expression. Furthermore, the role of stakeholders, including journalists, social media platforms, and users, in disseminating accurate and trustworthy information is analyzed. Using a qualitative approach, this study identifies the challenges in implementing these regulations and offers effective mitigation strategies. The findings suggest that collaboration between ethics, regulation, and digital literacy is key to building a healthier information ecosystem in the post-truth era. The practical implication of this research is that policymakers can design better regulations by considering digital media education, while social media platforms can implement policies that are more responsive to disinformation. It is hoped that the results of this research will provide valuable insights for policymakers, academics, and practitioners in designing more effective solutions to address disinformation.

ARTICLE HISTORY

Received 06/01/2025
Revised 13/01/2025
Accepted 20/01/2025
Published 25/02/2025

KEYWORDS

Digital media regulation; digital literacy; communication ethics; misinformation; post-truth era.

*CORRESPONDENCE AUTHOR

✉ wirdadelima4004233013@uinsu.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v9i1.10539>

PENDAHULUAN

Era *post-truth* mencerminkan perubahan mendasar dalam cara masyarakat mengonsumsi dan memproses informasi. Dalam konteks ini, fakta objektif sering kali kehilangan relevansi di tengah meningkatnya dominasi narasi emosional dan subjektif. Fenomena ini diperparah oleh perkembangan teknologi digital yang memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat tanpa batas geografis. Ironisnya, kebebasan distribusi informasi yang seharusnya meningkatkan akses terhadap kebenaran justru menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, masyarakat dapat dengan mudah mengakses berbagai sumber informasi, tetapi di sisi lain, hal ini membuka peluang bagi misinformasi untuk merajalela tanpa pengawasan yang memadai. Akibatnya, batas antara fakta dan opini menjadi kabur, menciptakan tantangan signifikan dalam membangun pemahaman bersama di tengah masyarakat yang semakin terfragmentasi (Aminudin, 2022).

Media digital tidak hanya memfasilitasi komunikasi, tetapi juga mengubah setiap pengguna menjadi "jurnalis amatir" yang memiliki kapasitas untuk menghasilkan dan mendistribusikan informasi secara masif. Namun, tanpa mekanisme verifikasi yang ketat, platform ini sering kali menjadi ladang subur bagi penyebaran informasi palsu. Sistem algoritmik yang digunakan oleh media sosial untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna juga menjadi katalisator masalah ini. Algoritma tersebut cenderung memprioritaskan konten yang memicu emosi, seperti kemarahan atau ketakutan, karena jenis konten ini lebih mungkin dibagikan dan menghasilkan interaksi. Akibatnya, fenomena *echo chamber* semakin mengakar, di mana individu hanya terpapar pada perspektif yang memperkuat

keyakinan mereka sendiri, mengabaikan pandangan yang berbeda. Hal ini tidak hanya memperburuk polarisasi sosial, tetapi juga memperlemah kemampuan masyarakat untuk berdialog secara konstruktif dan berbasis fakta (Faedlulloh & Duadji, [2019](#)).

Dampak misinformasi terhadap masyarakat sangat luas dan beragam, mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks ekonomi, informasi palsu dapat menyebabkan kerugian besar, misalnya melalui penipuan daring, manipulasi pasar, atau kebijakan ekonomi yang salah arah akibat data yang keliru. Dalam bidang kesehatan, misinformasi telah memperburuk situasi pandemi Covid-19 dengan menyebarkan informasi yang salah tentang vaksinasi, pengobatan alternatif, atau langkah-langkah pencegahan. Hal ini tidak hanya meningkatkan jumlah korban jiwa tetapi juga membebani sistem kesehatan. Selain itu, pada tingkat politik, misinformasi sering dimanfaatkan untuk menyebarkan propaganda, memecah belah masyarakat, atau bahkan mengintervensi hasil pemilu, yang mengancam stabilitas demokrasi. Ketika kepercayaan masyarakat terhadap institusi sosial dan politik terus terkikis, kemampuan kolektif untuk menghadapi tantangan global pun semakin melemah (Chrisnatalia & Rahadi, [2020](#)).

Penerapan etika dalam komunikasi digital adalah langkah mendesak untuk mengatasi permasalahan misinformasi. Prinsip kejujuran dan transparansi harus menjadi dasar bagi semua pelaku komunikasi digital, termasuk individu, media massa, dan platform teknologi. Namun, menerapkan etika ini tidaklah mudah di tengah dinamika media digital yang sangat cepat dan sering kali tidak terkontrol. Tantangan muncul dari kurangnya mekanisme akuntabilitas yang memadai untuk memantau perilaku tidak etis di dunia maya, baik itu penyebaran informasi palsu oleh pengguna individu maupun kelalaian platform dalam mencegah penyebaran konten berbahaya. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara pembuat kebijakan, perusahaan teknologi, dan masyarakat untuk membangun standar etika yang dapat diterapkan secara luas. Langkah ini harus diiringi dengan literasi digital yang memadai agar setiap individu memiliki kemampuan untuk membedakan informasi yang valid dari yang palsu (Febrianita & Wulandari, [2020](#)).

Di tengah era *post-truth*, di mana emosi dan opini subjektif sering mengungguli fakta objektif, perpaduan antara etika dan regulasi menjadi komponen penting dalam mengatasi misinformasi di ranah digital. Etika berperan sebagai landasan moral yang mendorong individu dan platform digital untuk bertindak bertanggung jawab dalam penyebaran informasi, sementara regulasi menyediakan kerangka hukum yang mengatur dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang merugikan publik. Kedua pendekatan ini saling melengkapi di mana etika mendorong kesadaran untuk bertindak benar, sementara regulasi memberikan kepastian dengan aturan yang jelas. Dalam konteks ini, etika memberikan dasar nilai-nilai universal seperti kejujuran dan keterbukaan, sementara regulasi memastikan nilai-nilai tersebut terlindungi melalui kebijakan yang terstruktur. Dengan menyatukan kedua aspek tersebut, masyarakat dapat mengembangkan strategi yang tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga mampu mencegah ancaman misinformasi secara efektif.

Penelitian sebelumnya telah memberikan wawasan berharga tentang mekanisme penyebaran misinformasi dan dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Misalnya, informasi palsu cenderung menyebar lebih cepat daripada informasi yang benar, terutama di platform seperti Twitter, karena sifatnya yang lebih mengejutkan dan menarik perhatian (Aïmeur, Amri, & Brassard, [2023](#)). Sementara itu, misinformasi dapat memengaruhi persepsi publik, termasuk pada isu-isu sensitif seperti politik dan kesehatan, yang berkontribusi pada meningkatnya polarisasi sosial (Allcott & Gentzkow, [2017](#)). Studi-studi ini menekankan pentingnya literasi digital untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi dan menolak informasi palsu. Selain itu, regulasi yang efektif diperlukan untuk memastikan akuntabilitas platform teknologi dalam mengelola konten mereka.

Namun, studi-studi sebelumnya masih berfokus pada pendekatan parsial, seperti menekankan pentingnya literasi digital sebagai kemampuan individu untuk mengenali dan menolak misinformasi, atau membahas regulasi sebagai instrumen hukum untuk memastikan akuntabilitas platform digital. Namun, dimensi etika, yang berperan penting dalam mendorong tanggung jawab moral baik pada tingkat individu maupun kelembagaan, sering kali kurang mendapat perhatian yang memadai. Akibatnya, pendekatan yang mengintegrasikan ketiga elemen, yakni etika, regulasi, dan literasi digital yang belum banyak dikaji secara menyeluruh, meskipun kombinasi tersebut berpotensi besar menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pendekatan holistik semacam ini tidak hanya dapat memperkuat kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi secara kritis, tetapi juga mendorong pengambilan keputusan yang berbasis nilai dan keadilan, yang sangat relevan dalam menghadapi tantangan kompleks misinformasi pada era *post-truth*.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengintegrasikan dimensi etika, regulasi, dan literasi sebagai sebuah kerangka holistik. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada upaya reaktif untuk menanggulangi misinformasi, tetapi juga pada langkah preventif yang membangun kesadaran moral, tanggung jawab hukum, dan kemampuan kritis masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat pada era digital.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran etika dan regulasi dalam mengatasi misinformasi di media digital, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya, serta menawarkan rekomendasi strategis bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, media, dan masyarakat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan publik dan praktik komunikasi media digital yang lebih bertanggung jawab. Dengan menyelaraskan etika dan regulasi, penelitian ini dapat membantu menciptakan ekosistem informasi yang lebih sehat dan terpercaya, sekaligus mendorong literasi digital di kalangan masyarakat.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi peran etika dan regulasi dalam menangani misinformasi di media digital pada era *post-truth*. Penelitian ini melibatkan beberapa tahapan yang dirancang dengan cermat. Pertama, kriteria pemilihan informan wawancara ditetapkan secara spesifik untuk memastikan data yang kaya dan relevan. Informan terdiri dari jurnalis, ahli komunikasi, pengelola platform media sosial, pembuat kebijakan, dan akademisi, yang dipilih secara purposif berdasarkan keahlian dan keterlibatan langsung mereka dalam isu misinformasi. Jumlah ini dianggap memadai untuk mencapai saturasi data yang mendalam. Wawancara dilakukan dengan pedoman semi-terstruktur untuk menggali pandangan, pengalaman, dan rekomendasi mereka secara mendetail (Sugiyono, 2017). Kedua, untuk meningkatkan keandalan data, penelitian ini menggunakan metode triangulasi, baik sumber, metode, maupun teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data wawancara dari berbagai jenis informan. Triangulasi metode melibatkan penggabungan wawancara, observasi partisipatif, dan analisis konten. Sementara itu, triangulasi teori dilakukan dengan memanfaatkan berbagai perspektif teoretis terkait etika komunikasi, regulasi, dan literasi digital. Ketiga, observasi partisipatif dilakukan dengan memantau interaksi di platform media sosial, seperti Twitter, Facebook, dan Instagram, selama periode tiga bulan. Pengamatan difokuskan pada pola penyebaran misinformasi, respons pengguna, serta mekanisme yang digunakan platform untuk mengelola konten. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa misinformasi sering kali beredar dalam bentuk visual atau teks singkat yang memancing emosi, serta memanfaatkan celah algoritma platform (Sulistiyo, 2023). Keempat, analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi tema dan karakteristik utama dari misinformasi yang beredar di media digital. Data dianalisis secara tematik dengan pengkodean manual untuk menemukan pola, jenis informasi

yang sering disebarkan, dan reaksi masyarakat. Seluruh data diolah secara induktif, dengan pola dan hubungan antar-temuan diinterpretasikan dalam kerangka teori yang relevan. Dengan pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya bertujuan memberikan kontribusi teoretis tetapi juga menawarkan rekomendasi praktis untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih etis, transparan, dan bertanggung jawab (Abdussamad, [2021](#)).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Era *Post-Truth*: Ciri dan Dampaknya

Era *post-truth* adalah istilah yang menggambarkan keadaan di mana fakta objektif kehilangan pengaruhnya dalam membentuk opini publik, digantikan oleh emosi dan keyakinan pribadi. Fenomena ini menjadi sorotan global setelah peristiwa politik besar seperti pemilihan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat dan referendum Brexit di Inggris pada tahun 2016. Dalam kedua peristiwa tersebut, penyebaran informasi yang tidak akurat dan hoaks terbukti memengaruhi keputusan politik secara signifikan. Dalam era ini, misinformasi memiliki dampak yang lebih luas karena memanfaatkan emosi individu untuk memperkuat keyakinan yang tidak berbasis fakta, sehingga menciptakan lingkungan yang rentan terhadap manipulasi informasi (Arifin & Fuad, [2021](#)).

Salah satu ciri khas era *post-truth* adalah dominasi emosi dalam membentuk opini publik. Informasi yang sejalan dengan perasaan atau kepercayaan seseorang lebih mudah diterima, meskipun tidak didukung oleh data yang valid. Selain itu, media sosial berperan besar dalam mempercepat penyebaran misinformasi. Algoritma platform media sosial dirancang untuk memprioritaskan konten yang menarik perhatian pengguna, yang sering kali berupa berita bohong atau provokatif. Akibatnya, hoaks lebih cepat viral dibandingkan dengan informasi yang terverifikasi. Kondisi ini diperburuk oleh semakin menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap media tradisional dan institusi resmi, yang menyebabkan banyak orang beralih kepada sumber informasi alternatif yang sering kali tidak dapat dipercaya (Fatmawati, [2020](#)).

Pengaruh politik dalam era *post-truth* juga tidak bisa diabaikan. Aktor politik menggunakan misinformasi sebagai alat strategis untuk memanipulasi opini publik. Dengan menyebarkan narasi tertentu melalui media sosial atau kanal komunikasi lainnya, mereka dapat membentuk persepsi yang menguntungkan tujuan politik mereka. Strategi ini tidak hanya digunakan di negara maju tetapi juga di negara berkembang, di mana literasi media masyarakat sering kali rendah. Hasilnya, masyarakat menjadi lebih terpolarisasi, dan diskusi publik semakin sulit untuk mencapai kesepakatan yang berbasis fakta (Amilin, [2020](#)).

Dampak dari era *post-truth* merambah berbagai aspek kehidupan, termasuk kebijakan publik, kesehatan masyarakat, dan hubungan sosial. Penyebaran misinformasi di bidang kesehatan, misalnya, dapat menghambat upaya vaksinasi atau memperburuk penanganan pandemi. Dalam ranah sosial, *post-truth* meningkatkan polarisasi masyarakat, di mana kelompok-kelompok dengan pandangan berbeda sulit menemukan titik temu. Sementara itu, dalam kebijakan publik, keputusan yang didasarkan pada informasi yang salah berpotensi menciptakan masalah jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat (Evanalia, [2022](#)). Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak ini secara mendalam guna mencari solusi yang tepat.

Solusi untuk menghadapi era *post-truth* melibatkan berbagai pendekatan, salah satunya adalah meningkatkan literasi media dan informasi masyarakat. Pendidikan literasi media dapat membantu individu mengenali berita palsu, memahami bias dalam informasi, dan mengevaluasi keandalan sumber informasi. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan organisasi masyarakat diperlukan untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung transparansi informasi dan menekan penyebaran hoaks. Teknologi seperti verifikasi fakta otomatis dan algoritma yang lebih

etis juga dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan penyebaran informasi yang salah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat dapat lebih siap menghadapi tantangan era *post-truth* dan membangun lingkungan informasi yang lebih sehat (Mahpudin, [2019](#)).

Penyebaran Misinformasi: Tantangan dan Peran Media Digital

Penyebaran misinformasi semakin meningkat pada era digital, di mana informasi dapat dengan mudah dan cepat tersebar melalui berbagai platform, terutama media sosial. Misinformasi merujuk pada informasi yang salah atau menyesatkan yang dapat muncul tanpa niat jahat, berbeda dengan disinformasi yang sengaja dibuat untuk menipu. Berbagai sumber misinformasi, baik individu, kelompok, maupun institusi, sering kali tidak memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram menjadi saluran utama penyebaran misinformasi karena kemampuan platform tersebut untuk menyebarkan informasi secara luas dan instan. Selain itu, dampak emosional juga memainkan peran penting dalam penyebaran misinformasi, dengan individu cenderung mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan dan emosi mereka, membuat mereka rentan terhadap informasi yang disajikan secara menarik secara emosional (Akbar & Fahlevi, [2023](#)).

Dampak misinformasi tidak hanya terbatas pada individu, tetapi juga memperdalam polarisasi sosial. Informasi yang mendukung pandangan tertentu sering kali menciptakan "*echo chamber*," di mana individu hanya menerima informasi yang memperkuat pandangan mereka dan mengabaikan informasi yang bertentangan. Fenomena ini dapat memperburuk perpecahan dalam masyarakat, mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang rasional, dan mengurangi kemampuan untuk berdialog secara konstruktif.

Upaya untuk memerangi misinformasi menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah rendahnya tingkat kepercayaan terhadap sumber informasi yang valid. Masyarakat cenderung mencari informasi yang sesuai dengan pandangan mereka dan mengabaikan sumber yang bertentangan, yang membuatnya sulit untuk mengubah keyakinan yang sudah terbentuk. Pendekatan berbasis model defisit informasi sering kali tidak efektif dalam menjelaskan mengapa individu tetap percaya pada misinformasi meskipun sudah diberikan fakta yang benar (Gelfert, [2018](#)). Hal ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi lebih kompleks dan membutuhkan strategi komunikasi yang lebih holistik.

Selain tantangan terkait kepercayaan dan keyakinan individu, peran teknologi juga menjadi sorotan dalam penyebaran misinformasi. Algoritma media sosial sering kali memprioritaskan konten yang menarik perhatian tanpa mempertimbangkan keakuratan informasi, yang menyebabkan misinformasi menyebar lebih cepat dibandingkan dengan informasi yang valid. Dengan kemampuan algoritma untuk menentukan jenis konten yang tampil di feed pengguna, informasi yang dapat memicu reaksi emosional seringkali lebih mudah tersebar, sehingga meningkatkan potensi penyebaran misinformasi di platform-platform tersebut (Lewandowsky, Ecker, & Cook, [2017](#)).

Dampak misinformasi sangat meluas dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan kesehatan masyarakat. Dalam konteks sosial, misinformasi dapat menciptakan ketidakpercayaan antara individu dan institusi, serta memperdalam polarisasi politik. Masyarakat yang terpapar misinformasi cenderung mengembangkan pandangan ekstrem dan mengabaikan fakta yang bertentangan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko terjadinya konflik sosial. Polarisasi yang semakin dalam ini menghalangi terciptanya dialog yang konstruktif dan merusak kohesi sosial dalam masyarakat. Di ranah politik, penyebaran misinformasi memiliki potensi untuk memengaruhi hasil pemilihan melalui manipulasi opini publik. Sebagai contoh, selama pemilihan umum, penyebaran berita palsu dapat merusak persepsi pemilih terhadap kandidat tertentu, yang

akhirnya dapat mempengaruhi hasil akhir pemilu. Berita yang salah atau misinformasi yang sengaja disebarkan dapat menciptakan ketidakpastian dan kebingungan di kalangan pemilih, merusak integritas proses demokrasi (Tandoc, Lim, & Ling, [2018](#)).

Dalam konteks kesehatan, misinformasi dapat menimbulkan risiko serius bagi masyarakat. Misalnya, informasi yang salah tentang vaksinasi, penyakit, dan pengobatan berpotensi menyebabkan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap intervensi medis yang penting. Selama pandemi Covid-19, misinformasi yang beredar di media sosial tentang virus dan vaksin menyebabkan peningkatan penolakan vaksin serta perilaku berisiko di kalangan sebagian masyarakat (Chou, Gaysynsky, & Vanderpool, [2021](#)). Hal ini menunjukkan bagaimana misinformasi dapat memperburuk krisis kesehatan masyarakat dan merugikan upaya pencegahan serta pengendalian penyakit.

Salah satu kasus yang mencolok dalam penyebaran misinformasi adalah selama pemilihan umum 2016 di Amerika Serikat, yang berdampak negatif terhadap proses demokrasi. Berita palsu dan rumor tersebar luas di media sosial selama periode ini, memengaruhi persepsi pemilih dan hasil pemilu. Salah satu klaim yang beredar adalah informasi salah terkait dengan pengundian suara, seperti klaim bahwa pemilih dapat memberikan suara melalui SMS atau bahwa ada biaya yang harus dibayar untuk memilih. Penelitian menunjukkan bahwa informasi seperti ini sangat efektif dalam menyesatkan pemilih, terutama mereka yang kurang memahami proses pemilu. Platform media sosial seperti Facebook dan Twitter menjadi saluran utama penyebaran berita palsu yang bertujuan untuk memecah belah dan mempolarisasi opini publik (Allcott & Gentzkow, [2017](#)).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran misinformasi dalam komunikasi media digital pada era *post-truth* memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan publik dan pengambilan keputusan. Analisis konten mengungkapkan bahwa misinformasi sering kali disebarkan melalui media sosial, dengan jenis informasi yang umum meliputi berita palsu, teori konspirasi, serta isu-isu politik dan kesehatan yang menyesatkan. Pengguna cenderung lebih mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka, yang memperkuat efek "*echo chamber*". Wawancara dengan jurnalis dan ahli komunikasi mengungkapkan adanya tekanan antara tanggung jawab etis untuk menyampaikan informasi yang akurat dan kebutuhan untuk menarik perhatian audiens. Regulasi yang ada sering kali dianggap tidak cukup efektif dalam menangani masalah ini (Lewandowsky, Ecker, & Cook, [2017](#)).

Selain itu, pendidikan media dan literasi informasi diidentifikasi sebagai strategi utama untuk mengatasi misinformasi, karena dapat meningkatkan kemampuan pengguna dalam mengevaluasi informasi secara kritis dan membantu mengurangi dampaknya. Teknologi, seperti alat verifikasi fakta dan algoritma yang transparan, juga memiliki potensi besar dalam memitigasi penyebaran misinformasi. Meskipun demikian, ada kekhawatiran terkait dengan potensi penyalahgunaan teknologi serta masalah privasi pengguna.

Etika dan Regulasi dalam Mengatasi Misinformasi

Etika dalam komunikasi merujuk pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku serta tindakan dalam proses komunikasi. Dalam konteks ini, etika memiliki peran penting dalam membangun hubungan yang baik, menghindari konflik, dan mempromosikan nilai-nilai sosial yang positif. Terdapat beberapa prinsip utama yang mendasari etika komunikasi, antara lain: kejujuran, yang mengharuskan penyampaian informasi secara akurat tanpa menyembunyikan fakta penting; integritas, yang menekankan pentingnya konsistensi perilaku dan tindakan berdasarkan prinsip moral yang baik; tanggung jawab, yang mengharuskan individu untuk bertanggung jawab atas tindakan dan perilakunya dalam komunikasi; penghormatan, yang mencakup penghargaan terhadap

orang lain, keyakinan, serta perbedaan yang ada; dan empati, yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain (Maharani, [2024](#)).

Meskipun prinsip-prinsip ini esensial, etika komunikasi juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan budaya, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman antara individu atau kelompok yang memiliki latar belakang budaya berbeda. Selain itu, kebebasan berekspresi sering kali dapat mengarah pada penyebaran informasi yang tidak benar atau bahkan merugikan orang lain. Pengaruh media sosial yang semakin kuat juga menjadi faktor penting, di mana informasi dapat tersebar dengan sangat cepat dan sulit untuk dikendalikan, memperburuk masalah etika dalam komunikasi.

Etika dalam komunikasi berlaku tidak hanya untuk individu, tetapi juga dalam berbagai konteks, seperti komunikasi interpersonal, organisasi, dan publik. Dalam komunikasi interpersonal, etika menekankan pentingnya mendengarkan dengan cermat, menghargai pandangan orang lain, serta menjaga kerahasiaan informasi pribadi. Penerapan prinsip-prinsip etika dalam komunikasi interpersonal berkontribusi pada terciptanya hubungan yang harmonis dan saling menghormati antara individu (Sari & Rambe, [2018](#)).

Di ranah komunikasi organisasi, etika berkaitan dengan pengelolaan informasi yang transparan dan menghindari diskriminasi atau perlakuan tidak adil terhadap karyawan atau pemangku kepentingan lainnya. Organisasi yang menerapkan etika komunikasi dengan baik akan lebih mampu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan adil. Sementara itu, dalam komunikasi publik, etika mengutamakan akurasi informasi, menghindari manipulasi, serta mempertimbangkan dampak sosial dari pesan yang disampaikan (Prabawa & Rizan, [2015](#)). Oleh karena itu, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip etika dalam semua bentuk komunikasi guna menciptakan lingkungan yang lebih sehat, konstruktif, dan bertanggung jawab.

Regulasi kebijakan merupakan serangkaian aturan dan pedoman yang ditetapkan untuk mengatur perilaku individu dan organisasi, terutama dalam konteks komunikasi dan penyebaran informasi. Dalam era digital dan *post-truth*, regulasi kebijakan menjadi semakin penting untuk menangani tantangan yang berkaitan dengan penyebaran misinformasi dan disinformasi. Pemerintah di berbagai negara telah mulai mengembangkan kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Misalnya, beberapa negara di Eropa telah menerapkan undang-undang yang mengharuskan platform media sosial untuk menghapus konten yang dianggap menyesatkan dalam waktu tertentu (Wineburg & McGrew, [2017](#)).

Regulasi tersebut juga mencakup peningkatan transparansi algoritma yang digunakan oleh platform digital dalam menentukan jenis konten yang ditampilkan kepada pengguna. Meskipun demikian, penerapan regulasi ini menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan kebebasan berbicara dan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Kebebasan berekspresi yang dijamin dalam banyak konstitusi negara sering kali berbenturan dengan upaya pengaturan konten di media sosial. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan kerangka regulasi yang seimbang dan kolaboratif, melibatkan sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil.

Studi kasus terkait etika dan regulasi dalam mengatasi misinformasi dapat dilihat dari peran pemerintah dan platform media sosial dalam menangani penyebaran informasi yang salah selama pandemi Covid-19. Pada awal pandemi, misinformasi tentang penyebab, cara penularan, hingga pengobatan virus menyebar dengan cepat di berbagai media sosial, seperti Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Salah satu contoh adalah klaim bahwa konsumsi bawang putih secara berlebihan dapat mencegah infeksi Covid-19. Meskipun klaim ini tidak berdasar secara ilmiah, penyebarannya menyebabkan kebingungan dan menyesatkan masyarakat. Dari sudut pandang etika, platform media

sosial menghadapi dilema antara menjaga kebebasan berekspresi dan tanggung jawab moral untuk mencegah penyebaran informasi berbahaya. Beberapa platform mulai menerapkan kebijakan seperti memberi label pada konten yang diragukan atau mengarahkan pengguna ke sumber informasi terpercaya, seperti situs World Health Organization (WHO). Namun, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan tentang batasan etika dalam menyensor atau mengatur konten pengguna.

Di sisi lain, pemerintah di berbagai negara memberlakukan regulasi untuk menekan penyebaran misinformasi, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia atau aturan khusus di Uni Eropa. Meski demikian, penerapan regulasi ini juga tidak lepas dari kritik, karena terkadang disalahgunakan untuk membatasi kebebasan pers atau menghukum pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Kasus ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara regulasi yang efektif dan pendekatan berbasis etika dalam menangani misinformasi. Kolaborasi antara pemerintah, platform teknologi, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan informasi yang lebih sehat tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan kebebasan berekspresi.

Kolaborasi yang terjadi diharapkan dapat menciptakan lingkungan informasi yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Dengan menggabungkan berbagai perspektif dan pengalaman, regulasi dapat disusun secara lebih holistik dan adil, menghindari potensi penyalahgunaan dan memastikan bahwa prinsip-prinsip kebebasan berbicara tetap dihormati. Ini juga memerlukan pengawasan yang ketat terhadap kebijakan yang diterapkan, agar tidak mengekang kebebasan individu secara berlebihan.

Strategi mitigasi misinformasi merupakan langkah-langkah yang dirancang untuk mengurangi penyebaran informasi yang salah dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu yang kompleks. Salah satu pendekatan utama adalah pendidikan literasi media, yang bertujuan memberikan keterampilan kepada individu untuk mengevaluasi dan menilai informasi secara kritis (Chou et al., [2021](#)). Program literasi media yang diterapkan di sekolah maupun masyarakat dapat membantu orang memahami cara informasi diproduksi dan disebarluaskan, serta mengenali tanda-tanda informasi yang tidak akurat. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, platform media sosial, dan organisasi masyarakat sipil sangat penting dalam mengembangkan kebijakan yang efektif untuk menangani masalah misinformasi.

Tantangan dalam regulasi misinformasi sangat kompleks dan sering kali melibatkan pertimbangan antara kebebasan berbicara dan perlindungan publik. Salah satu tantangan utama adalah menentukan batasan yang jelas antara kebebasan berekspresi dan penyebaran informasi yang menyesatkan. Regulasi yang terlalu ketat dapat berisiko menghambat kebebasan berbicara dan menciptakan suasana ketakutan di kalangan individu dan media untuk menyampaikan pandangan mereka. Selain itu, ada masalah teknis dalam penegakan regulasi, termasuk kesulitan dalam mengidentifikasi sumber misinformasi dan menilai akurasi informasi dalam konteks yang sangat dinamis dan cepat berubah (Febriansyah & Muksin, [2020](#)).

Media sosial, sebagai platform utama penyebaran informasi, sering kali beroperasi di luar yurisdiksi negara tertentu, yang membuat penegakan hukum menjadi lebih sulit. Keberagaman budaya dan pandangan di setiap negara juga menambah lapisan kompleksitas dalam pengembangan kebijakan yang dapat diterima secara luas. Selain itu, upaya regulasi sering berujung pada perdebatan mengenai siapa yang berwenang menilai kebenaran informasi dan bagaimana melakukan penilaian secara objektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang dan kolaboratif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil, untuk menciptakan kerangka regulasi yang efektif dan responsif terhadap tantangan ini.

SIMPULAN

Era *post-truth* mencerminkan keadaan di mana fakta objektif tergeser oleh emosi dan keyakinan pribadi dalam membentuk opini publik. Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap literatur dengan menyoroti peran media sosial dalam memperkuat penyebaran misinformasi melalui algoritma yang memprioritaskan konten menarik perhatian dibandingkan keakuratan informasi. Dalam praktik, penelitian ini menggarisbawahi perlunya langkah-langkah strategis untuk mengurangi dampak negatif era *post-truth* terhadap masyarakat. Rekomendasi strategis untuk pemangku kepentingan meliputi beberapa aspek. Pemerintah dapat merancang regulasi yang lebih adil dan efektif untuk mengawasi distribusi informasi digital, termasuk penguatan undang-undang terkait misinformasi dan literasi media. Akademisi diharapkan terus mengembangkan penelitian interdisipliner yang mendalami pola penyebaran misinformasi serta solusi inovatif yang berbasis bukti. Platform media sosial harus mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam menciptakan ekosistem informasi yang transparan dengan memperbaiki algoritma dan meningkatkan upaya moderasi konten. Namun, penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Sebagai contoh, fokus utama pada peran media sosial mungkin mengesampingkan pengaruh faktor lain, seperti media tradisional atau konteks budaya lokal, yang juga berkontribusi dalam dinamika era *post-truth*. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi dimensi-dimensi tersebut serta mengevaluasi efektivitas intervensi yang sudah diterapkan. Selain itu, studi lintas budaya yang lebih luas diperlukan untuk memahami bagaimana era *post-truth* berdampak secara berbeda di berbagai wilayah dan masyarakat. Dengan mengatasi keterbatasan ini dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, platform media sosial, serta masyarakat, langkah mitigasi yang lebih efektif dapat dirancang. Upaya bersama ini akan membantu menciptakan lingkungan informasi yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang benar.

REFERENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Aïmeur, E., Amri, S., & Brassard, G. (2023). Fake News, Disinformation and Misinformation in Social Media: A Review. *Social Network Analysis and Mining*, 13(1), 30. <https://doi.org/10.1007/s13278-023-01028-5>
- Akbar, M. I., & Fahlevi, M. R. (2023). Cegah Penyebaran Misinformasi di Media Sosial Menggunakan Peralatan dan Fitur Literasi Digital. *RENATA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Kita Semua*, 1(1), 15–20. <https://doi.org/10.6124/1.renata.2>
- Allcott, H., & Gentzkow, M. (2017). Social Media and Fake News in the 2016 Election. *Journal of Economic Perspectives*, 31(2), 211–236. <https://doi.org/10.1257/jep.31.2.211>
- Amilin, A. (2020). Pengaruh Hoaks Politik dalam Era Post-Truth terhadap Ketahanan Nasional dan Dampaknya pada Kelangsungan Pembangunan Nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 7(3), 5–11. <https://doi.org/10.55960/jlri.v7i3.73>
- Aminudin, A. (2022). Menghadapi Disinformasi Konten Berita Digital pada era Post Truth. *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi*, 6(2), 283–292. <https://doi.org/10.51544/jlmk.v6i2.3137>
- Arifin, N. F., & Fuad, A. J. (2021). Dampak Post-Truth di Media Sosial. *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 10(3), 376–378. <https://doi.org/10.33367/ji.v10i3.1430>
- Chou, W.-Y. S., Gaysynsky, A., & Vanderpool, R. C. (2021). The COVID-19 Misinfodemic: Moving Beyond Fact-Checking. *Health Education & Behavior*, 48(1), 9–13. <https://doi.org/10.1177/1090198120980675>
- Chrisnatalia, S. G., & Rahadi, D. R. (2020). Komunikasi Digital Pada Pembelajaran Secara Daring Di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal BONANZA: Manajemen Dan Bisnis*, 1(2), 56–65. <https://doi.org/10.47896/mb.vi12.289>
- Evania, S. (2022). Peran Jurnalisme Media Sosial dalam Mewujudkan Demokrasi Indonesia pada era Post Truth. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 32–43. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.86>
- Faedlulloh, D., & Duadji, N. (2019). Birokrasi dan Hoax: Studi Upaya Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara pada era Post-Truth. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(3), 313–332. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i3.566>
- Fatmawati, E. (2020). Tantangan Literasi Informasi Bagi Generasi Muda Pada Era Post-Truth. *Jurnal Perpustakaan Pertanian*, 28(2), 57. <https://doi.org/10.21082/jpp.v28n2.2019.p57-66>

- Febrianita, R., & Wulandari, A. (2020). Information Disorder & The Online's Gatekeeping Mechanism Struggle in Post Truth Era. *JCommsci - Journal of Media and Communication Science*, 3(3), 134-148. <https://doi.org/10.29303/jcommsci.v3i3.78>
- Febriansyah, F., & Muksin, N. N. (2020). Fenomena Media Sosial: Antara Hoaks, Destruksi Demokrasi, dan Ancaman Disintegrasi Bangsa. *Sebatik*, 24(2). <https://doi.org/10.46984/sebatik.v24i2.1091>
- Gelfert, A. (2018). Fake News: A Definition. *Informal Logic*, 38(1), 84-117. <https://doi.org/10.22329/il.v38i1.5068>
- Lewandowsky, S., Ecker, U. K. H., & Cook, J. (2017). Beyond misinformation: Understanding and coping with the "post-truth" era. *Journal of Applied Research in Memory and Cognition*, 6(4), 353-369. <https://doi.org/10.1016/j.jarmac.2017.07.008>
- Maharani, E. (2024). The Fourth Estate Unbound: Examining Press Law and Ethics in the Digital Age in Indonesia. *Indonesia Media Law Review*, 3(1). <https://doi.org/10.15294/imrev.v3i1.78901>
- Mahpudin, M. (2019). Pemanfaatan Teknologi Pemilu di Tengah Era Post Truth: Antara Efisiensi dan Kepercayaan. *Jurnal PolGov*, 1(2), 157. <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i2.55886>
- Prabawa, L. A., & Rizan, M. (2015). Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Inovasi, Kepemimpinan dan Kinerja Perusahaan: Studi Transformasi PT. Pos Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPEB)*, 3(1), 81-100.
- Sari, E., & Rambe, E. M. (2018). Efektivitas Komunikasi Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Pencegahan Konflik Keagamaan di Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Bimas Islam*, 8(2), 325-364. <https://doi.org/https://doi.org/10.37302/jbi.v11i2.56>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. 25). Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyo, U. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jambi: PT. Salim Media Indonesia.
- Tandoc, E. C., Lim, Z. W., & Ling, R. (2018). Defining "Fake News." *Digital Journalism*, 6(2), 137-153. <https://doi.org/10.1080/21670811.2017.1360143>
- Wineburg, S., & McGrew, S. (2017). Lateral Reading: Reading Less and Learning More When Evaluating Digital Information. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3048994>